

KEDAULATAN PANGAN DI TENGAH PERANG, IMPERIALISME, DAN KELAPARAN YANG MENIMPAA MASYARAKAT DI SELURUH DUNIA

April 2026

“Perang dan kelaparan adalah dua sisi dari sistem yang sama. Membela tanah dan pangan berarti membela kehidupan itu sendiri.”

I. DUNIA DI AMBANG KRISIS: MOMEN SEJARAH SAAT INI

Kita sedang menghadapi serangkaian krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah dalam sejarah modern ini begitu banyak konflik bersenjata meletus secara bersamaan di begitu banyak benua. Perang di Gaza, Lebanon, Mali, Ukraina, Sudan, Yaman, Myanmar, Sahel, Republik Demokratik Kongo, dan Suriah bukanlah tragedi yang terisolasi. Ini adalah manifestasi gejala dari satu sistem global yang cacat secara struktural, yang dibangun di atas logika akumulasi kapitalis, rasisme struktural, ketegangan yang meningkat seputar kekuasaan geopolitik, ekstraksi sumber daya, dan dominasi neo-kolonial serta imperialis.

Saat ini, empat dinamika yang saling memperkuat sedang bersatu: krisis struktural kapitalisme global, eskalasi imperialisme militer oleh kekuatan-kekuatan dominan, perkembangan teknologi militer dengan dampak yang semakin merusak, dan penggunaan pangan secara sengaja sebagai senjata. Dinamika-dinamika ini merupakan ancaman eksistensial, tidak hanya bagi sistem pangan, tetapi juga bagi kemanusiaan dan alam itu sendiri, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang melanggar konvensi internasional yang mengikat.

Perjuangan mempertahankan tanah dan pangan secara historis telah menjadi bagian dari perlawanan rakyat terhadap penjajah. Sejak awal masa kolonial, tanah, air, hutan, dan wilayah telah dirampas untuk memperkaya kekuatan-kekuatan hegemonik global. Saat ini, neokolonialisme dan neoimperialisme terus berlanjut melalui intervensi militer dan sistem perdagangan, lembaga keuangan dan moneter neoliberal, serta perusahaan multinasional. Dinamika ini merupakan bagian dari apa yang disebut Naomi Klein sebagai “kapitalisme bencana,” sebuah sistem di mana krisis dimanfaatkan untuk memaksakan privatisasi dan deregulasi, memastikan bahwa merekalah yang membangun kembali dan mempromosikan teknologi baru untuk sistem produksi pangan yang baru. Contohnya: (i) Setelah menculik Presiden Nicolás Maduro, pemerintahan Trump berusaha membuka Venezuela bagi perusahaan pertambangan Amerika Serikat (AS), meskipun kebijakan Venezuela bertujuan melindungi sumber daya alam daripada mempromosikan privatisasi dan liberalisasi pasar; (ii) Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, Presiden George W. Bush memfasilitasi masuknya korporasi AS ke Irak.

La Via Campesina, gerakan internasional yang menyatukan lebih dari 180 organisasi dari 81 negara dan mewakili lebih dari 200 juta petani, masyarakat adat, dan komunitas pedesaan, menyuarakan peringatan. Sejalan dengan perjuangan utamanya, “di tengah krisis global, kami membangun kedaulatan pangan untuk menjamin masa depan umat manusia”—LVC menyoroti urgensi situasi ini. Kaum miskin pedesaan, mereka yang memberi makan dunia, lah yang menanggung beban terberat. Mereka terjebak dalam kemiskinan, kelaparan, dan konflik, yang memicu perampasan tanah dan migrasi paksa.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), konflik bersenjata merupakan faktor utama penyebab kelaparan di seluruh dunia. Fakta-fakta ini menuntut kejelasan moral dan politik yang mendesak.

733 JUTA	3.1 BILLION	60%	\$2.44 TRILIUN
jumlah orang yang kelaparan di seluruh dunia (FAO SOFI 2024)	tidak mampu membeli makanan sehat (FAO)	dari mereka yang kelaparan tinggal di wilayah konflik (WFP)	pengeluaran militer global pada tahun 2023 (SIPRI)

Sumber: Laporan FAO tentang Keadaan Ketahanan Pangan 2024 | Laporan Global WFP 2024 | Basis Data Pengeluaran Militer SIPRI 2024

II. GLOBALISASI PERANG: EKONOMI POLITIK KONFLIK – KONFLIK SAAT INI

Tidak mungkin memahami maraknya perang saat ini tanpa mengkaji kontradiksi struktural mendalam dalam kapitalisme abad ke-21. Akumulasi modal, mesin penggerak tatanan ekonomi global, selalu bergantung pada dua bentuk perampasan: eksploitasi tenaga kerja manusia, dan komodifikasi alam. Tanah, air, benih, mineral, gen, dan ruang atmosfer semuanya telah diubah menjadi sumber daya yang dapat diperdagangkan. Ketika sumber daya ini menjadi langka atau ketika negara-negara kuat menganggap pasokannya terancam, perang menjadi alat pilihan.

Dunia sedang menyaksikan transisi berbahaya akibat perselisihan kekuasaan geopolitik. Di saat yang sama, multilateralisme di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang terancam. Multilateralisme ini menghadapi tekanan yang semakin besar dari kekuatan-kekuatan hegemonik yang saling bersaing. Akibatnya, relevansi PBB dalam mengatur dan membentuk hubungan internasional semakin menurun.

Seiring dengan melemahnya hegemoni AS di bawah beban finansialisasi, deindustrialisasi, kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi dan teknologi, serta munculnya BRICS, kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi semakin tegas. Di bawah kepemimpinan Donald Trump dan doktrin “Make America Great Again” (MAGA)-nya, Washington telah mengambil sikap yang lebih agresif dalam mempertahankan posisinya di dunia. Trump bahkan menyiratkan bahwa kewenangannya sebagai panglima tertinggi lebih didasarkan pada moralitas pribadinya daripada hukum internasional, perjanjian, atau norma global.

Akibatnya, terjadi militerisasi yang meluas dalam hubungan internasional, di mana negara-negara di Global Selatan menanggung beban terberat. Wilayah-wilayah seperti dunia Arab dan lingkup geopolitiknya, Tanduk Afrika, Sahel, Amerika Latin, serta Asia Tenggara dan Timur (Indo-Pasifik) telah menjadi arena utama persaingan antara negara-negara adidaya.

Dinamika geopolitik ini ditandai oleh empat ciri struktural:

- **Militerisasi ekonomi global:** Pengeluaran militer mencapai rekor \$2,44 triliun pada tahun 2023 (SIPRI, 2024), sementara FAO memperkirakan bahwa mengakhiri kelaparan dunia akan menelan biaya \$267 miliar per tahun. Pilihan untuk mempersenjatai daripada memberi makan bukanlah suatu keharusan ekonomi—melainkan sebuah keputusan politik. Hal ini mencerminkan perspektif di mana dominasi geopolitik dipandang sebagai jalan menuju dominasi ekonomi global.
- **Munculnya kompleks militer-industri:** Lobi-lobi senjata di Amerika Serikat, Prancis, Israel, dan negara lain memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri. Ekspor senjata menghasilkan keuntungan yang mencapai ratusan miliar dolar, sementara wilayah yang

menerimanya diukur dengan jumlah korban jiwa. Kapasitas penghancuran persenjataan modern belum pernah terjadi sebelumnya dan menempatkan seluruh dunia pada risiko nuklir.

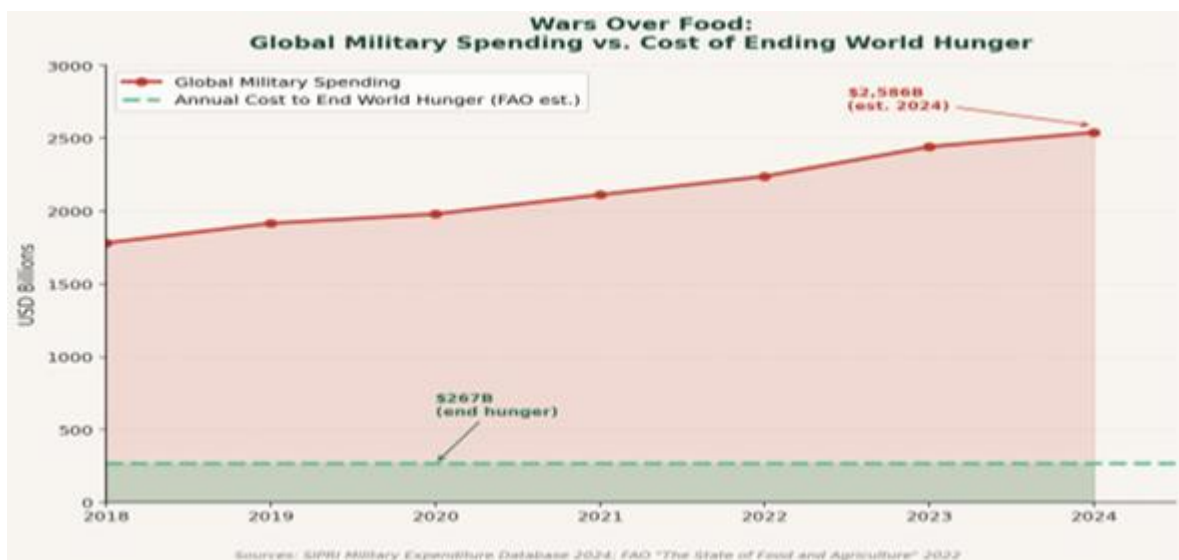
- **Perburuan sumber daya alam:** Unsur tanah jarang, bahan bakar fosil, air, dan lahan pertanian merupakan taruhan sesungguhnya dari sebagian besar konflik kontemporer. Penargetan ekspor gandum Ukraina, perebutan kobalt Kongo, dan pengepungan wilayah perikanan Gaza semuanya mencerminkan logika ini.
- **Ketergantungan struktural pada Global Selatan:** Penyesuaian struktural neoliberal selama beberapa dekade telah mengikis kedaulatan pangan negara-negara berkembang, membuat mereka bergantung pada jalur impor yang mudah dijadikan senjata melalui sanksi, blokade, atau pengecatan maritim.

Perang dan Kerusakan Ekologi

Perang-perang masa kini merupakan bencana ekologis. Konflik bersenjata mempercepat kerusakan lingkungan melalui pemboman ekosistem, pencemaran tanah dan air, pembakaran bahan bakar fosil dalam jumlah besar, serta runtuhnya tata kelola lingkungan. Wilayah konflik sering kali menjadi lokasi polusi beracun, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Pada saat yang sama, krisis ekologi yang semakin parah itu sendiri memicu ketegangan geopolitik. Seiring dengan terlewatnya batas-batas planet, termasuk ketidakstabilan iklim, kelangkaan air, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati, persaingan untuk sumber daya alam semakin intensif. Tanah, air, mineral langka, dan wilayah pertanian yang subur menjadi aset strategis dalam pertarungan geopolitik.

Hasilnya adalah lingkaran setan: kerusakan ekologi meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, dan konflik pada gilirannya memperparah kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, militerisasi ekonomi global tidak hanya merupakan ancaman bagi perdamaian, tetapi juga hambatan besar bagi keadilan iklim dan kelangsungan hidup ekologi.



Gambar 1. Pengeluaran Militer Global vs. Biaya Tahunan untuk Mengakhiri Kelaparan di Dunia — Sumber: SIPRI 2024; FAO "State of Food and Agriculture" 2022

Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) (2025), terdapat 129,9 juta orang yang terpaksa mengungsi dan tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia, dan untuk melindungi serta membantu

mereka, UNHCR mengucurkan dana sebesar \$10,785 miliar. Dalam konteks kritis ini, negara-negara di Belahan Utara telah memperketat kebijakan rasis dan anti-imigrasi mereka, yang pada gilirannya juga berdampak pada jutaan orang yang terpaksa mengungsi akibat krisis-krisis yang saling tumpang tindih.

III. HUNGER AS A WEAPON: THE SYSTEMATIC DESTRUCTION OF FOOD SYSTEMS

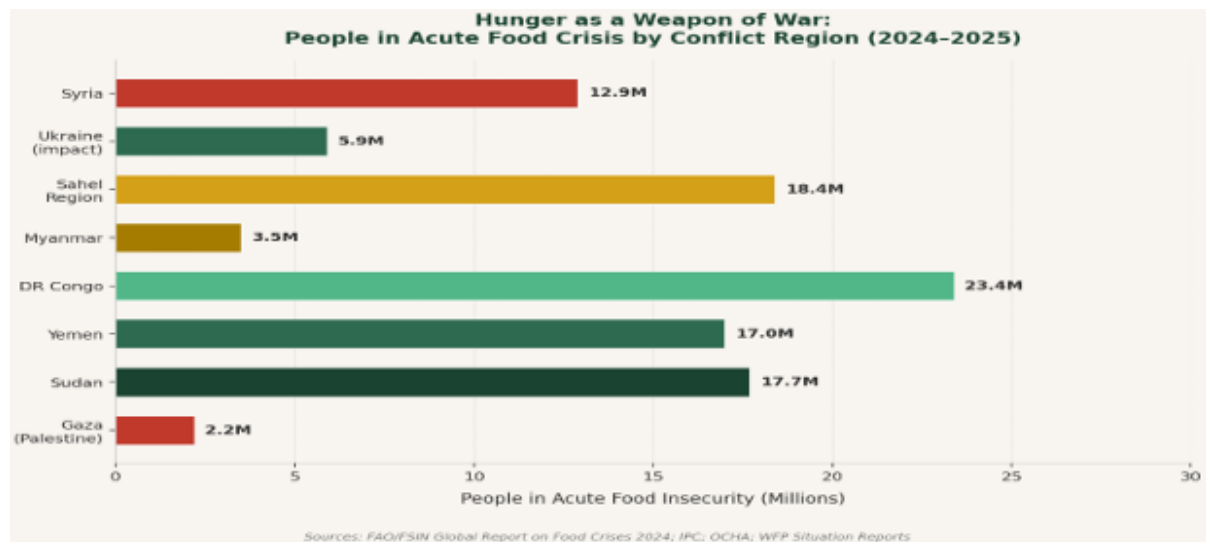
Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang bersifat strategis. Sepanjang sejarah, kerajaan-kerajaan memahami bahwa menghancurkan kemampuan suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri merupakan salah satu alat penaklukan yang paling efektif. Saat ini, logika kuno tersebut diterapkan dengan presisi modern: melalui pemboman udara terhadap sistem irigasi, blokade laut terhadap impor pangan, sanksi yang membatasi akses terhadap pupuk dan pestisida, serta serangan yang sengaja ditujukan pada bank benih, gudang biji-bijian, armada penangkap ikan, dan pasar pertanian.

Tiga kasus berikut ini menunjukkan pembongkaran sistem pangan secara sengaja sebagai mekanisme paksaan, hukuman, dan pengendalian populasi.

Di Gaza, penghancuran 80% lahan pertanian, pemboman kapal nelayan, dan pemblokiran koridor kemanusiaan merupakan apa yang disebut Pelapor Khusus PBB sebagai “genosida melalui kelaparan.”

Di Yaman, blokade selama satu dekade terhadap Pelabuhan Hudaydah—titik masuk bagi 70% impor pangan—telah menyebabkan salah satu kelaparan terparah dalam sejarah modern.

Di Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces) secara sistematis menghancurkan lumbung-lumbung pangan dan menjarah lahan pertanian, mengubah lumbung pangan menjadi bencana. Ini bukanlah kerugian sampingan. Ini adalah kebijakan yang disengaja dan harus disebut sebagai: kejahatan perang.



Gambar 2. Jumlah Penduduk yang Mengalami Krisis Pangan Akut menurut Wilayah Konflik (2024–2025) — Sumber: FAO/FSIN; IPC; Laporan Situasi WFP

Tabel berikut ini mencantumkan 20 kasus di mana pangan secara sengaja digunakan sebagai senjata dalam konflik-konflik kontemporer—yang diambil dari dokumen-dokumen Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), Komite Perencanaan

Internasional untuk Kedaulatan Pangan (CIP), Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dan organisasi-organisasi hak asasi manusia:

20 kasus yang tercatat: makanan yang digunakan sebagai senjata perang		
#	Region / conflict	Food weaponization Method & Impact
1	Gaza, Palestina (2023 -)	Kerusakan pertanian secara total: lebih dari 80% lahan pertanian rusak; nelayan dilarang melaut; kelaparan dinyatakan oleh IPC (2024)
2	Yaman (2015 -)	Blokade pelabuhan oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi: 70% pasokan pangan diimpor melalui Hodaydah; 21 juta orang mengalami kerawanan pangan (WFP)
3	Sudan (2023 -)	Pasukan RSF menghancurkan gudang-gudang pangan; 17,7 juta orang terancam krisis; sektor pertanian ambruk di Darfur dan Provinsi Khartoum
4	Ukraina (2022 -)	Serangan Rusia terhadap infrastruktur pertanian: 28% ekspor gandum global terganggu; lonjakan harga pangan global sebesar 34% (FAO)
5	Kongo (ongoing)	Kelompok bersenjata menguasai lahan pertanian; 23,4 juta orang mengalami kerawanan pangan akut; di bagian timur Republik Demokratik Kongo terjadi perusakan tanaman secara sistematis
6	Kuba (1962 -)	Blokade AS membatasi impor pangan; larangan impor minyak (2024) melumpuhkan rantai distribusi pangan di seluruh pulau
7	Syria (2011 -)	Penghancuran sistem irigasi yang disengaja; produksi gandum turun 75%; harga pangan naik 800% antara tahun 2011–2020
8	Ethiopia / Tigray (2020 - 2022)	Pasukan Ethiopia dan Eritrea menghancurkan hasil panen; WFP melaporkan adanya upaya sengaja untuk membuat orang kelaparan; 2 juta orang terpaksa mengungsi dari lahan pertanian
9	Myanmar (2021 -)	Tentara membakar sawah dan lumbung padi; 3,5 juta orang mengungsi; IPC memperkirakan 13,2 juta orang mengalami kerawanan pangan
10	Sahel – Mali/ Burkina Faso / Niger	Kelompok bersenjata secara sistematis menghalangi akses ke pasar dan lahan pertanian; 18,4 juta orang mengalami kerawanan pangan di seluruh wilayah Sahel (FEWSNET)
11	Venezuela (2015 -)	Sanksi ekonomi AS menyebabkan penurunan impor bahan kimia pertanian; produksi pangan turun 35%; angka malnutrisi akut naik menjadi 22%
12	Iraq (1990 - 2003)	Sanksi PBB menyebabkan 500.000 anak meninggal (UNICEF); pembatasan impor menghambat pasokan makanan dan obat-obatan
13	North Korea (ongoing)	Sanksi internasional yang diperparah oleh kebijakan kolektivisasi pemerintah menyebabkan kelaparan; 42% penduduk mengalami kekurangan gizi (FAO)
14	Somalia (2011)	Al-Shabaab menghalangi bantuan; kekeringan ditambah konflik = kelaparan; 260.000 orang tewas; 4,6 juta orang mengalami kerawanan pangan pada puncaknya (PBB)
15	Afganistan (2021 -)	Pembekuan aset senilai \$7 miliar oleh AS; 22,8 juta orang – lebih dari separuh populasi – menghadapi ketidakamanan pangan akut (WFP 2022)

16	Zimbabwe (2000s)	Penyitaan lahan menghancurkan pertanian komersial; produksi gandum anjlok 90%; hiperinflasi menghancurkan sistem pangan
17	Libya (2011 -)	Konflik telah menghancurkan jaringan air dan irigasi; kawasan Sahel menjadi tidak stabil akibat meluasnya peredaran senjata dari Libya
18	Haiti (ongoing)	Kontrol geng di Port-au-Prince menghambat pasokan pangan; 5 juta orang menghadapi kelaparan pada tingkat krisis (IPC 2024)
19	Lebanon (2020 -)	Ledakan di Pelabuhan Beirut menghancurkan silo-silo gandum utama; krisis ekonomi + blokade = 30% penduduk mengalami kerawanan pangan
20	Palestine / West Bank (ongoing)	Serangan pemukim Israel terhadap kebun zaitun; lebih dari 800.000 pohon dicabut sejak 1967; perampasan tanah secara sistematis

Gambar 3. 20 Kasus Terdokumentasi Penggunaan Pangan sebagai Senjata Perang — Sumber: FAO, WFP, IPC, OCHA, HRW, Amnesty International (2020–2025)

Kerusakan sistemik pada produksi dan distribusi pangan di wilayah konflik dan daerah terdampak semakin memperparah kerentanan sistem pangan global. Laporan Keadaan Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia (SOFI, 2025) menyebutkan bahwa faktor-faktor lain yang terkait dengan konflik dan memperburuk kelaparan adalah perlambatan ekonomi serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, terutama akibat inflasi yang melonjak. Laporan SOFI mencatat bahwa indeks harga pangan telah meningkat jauh lebih pesat daripada indeks harga konsumen secara keseluruhan selama enam tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan, peningkatan impor, serta ekspansi moneter; laporan tersebut juga mencatat bahwa ini merupakan dampak langsung dari krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2019.

Penting untuk dicatat bahwa mata uang yang paling diuntungkan dari krisis-krisis ini adalah dolar; dolarisasi ekonomi global terkait langsung dengan bisnis perang dan krisis pangan.

“Setiap tahun konflik terjadi, produksi pertanian menurun rata-rata sebesar 4,4%. Ketika sistem pangan hancur, seluruh generasi yang menanggung akibatnya.” — FAO

Perang yang dipicu oleh serangan AS-Israel terhadap Iran sedang membebani pasar energi dan perekonomian global, terutama mengingat tingginya ketergantungan pada minyak dari Timur Tengah. “Penutupan lalu lintas komersial melalui Selat Hormuz menyebabkan harga minyak melonjak; minyak mentah Brent naik dari \$73 pada 27 Februari 2026 menjadi \$107 pada 8 Maret 2026 – kenaikan lebih dari 40 persen dalam 10 hari. Ketidakpastian pasar dan volatilitas harga memaksa negara-negara dan perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan global untuk mempertimbangkan kembali kebijakan dan struktur ekonomi mereka, yang berpotensi menyebabkan pergeseran mendasar dalam perdagangan dan energi global.” (<https://www.aljazeera.com/opinions/2026/3/10/geopolitical-analysis-of-the-imposed-war-against-iran>)

Asia mengimpor sekitar 60% minyak mentah dan bahan baku petrokimia dari Timur Tengah, sehingga menjadikannya kawasan dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap pasokan energi dari wilayah tersebut. Pada tahun 2025, pasokan minyak Asia terdiri dari: Timur Tengah (59,0%), Eropa Timur (9,0%), Amerika Selatan (8,0%), Afrika Barat (7,0%), dan Lainnya (17,4%) (<https://www.cnbcindonesia.com/research/20260309074015-128-717151/asia-bisa-duluan-terkena-krisis-energi-kilang-minyak-berebut-pasokan>). Perang saat ini melawan Iran akan menyebabkan inflasi

energi tidak hanya karena terganggunya pasokan minyak, tetapi juga karena pemboman kilang minyak baik di Iran maupun di negara-negara Teluk.

Akibat tantangan ini, beberapa negara mencari pemasok baru dan berusaha mengurangi penggunaan minyak, seperti dengan mengurangi jumlah hari kerja per minggu sebagaimana telah diterapkan oleh Sri Lanka, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Pada saat yang sama, negara-negara kaya minyak memprioritaskan kebutuhan domestik daripada ekspor.

IV. PETANI DAN MASYARAKAT ADAT DI GARIS DEPAN: KORBAN DAN PARA PENENTANG

Masyarakat petani dan masyarakat adat, termasuk perempuan dan anak-anak, adalah korban pertama perang dan yang terakhir diakui sebagai korban. Sementara kamera media global merekam kehancuran di perkotaan, penderitaan di pedesaan sebagian besar tetap tak terlihat. Namun, justru penduduk pedesaanlah yang menanggung beban berat dari pengungsian, runtuhnya pertanian, dan ekspansi agribisnis korporasi yang rakus ke wilayah-wilayah yang dilemahkan oleh perang.

Data statistik menggambarkan kisah yang menghancurkan: 60% dari orang yang terpaksa mengungsi akibat konflik adalah petani sebelum pengungsian (UNHCR). Konflik telah menghancurkan lebih dari 12 juta hektar lahan pertanian dalam dekade terakhir (FAO). Petani kecil, yang memproduksi 80% dari pangan yang dikonsumsi di Global Selatan, secara sistematis dirampas haknya, baik oleh perang maupun oleh perampasan lahan korporasi yang mengikuti. Pasokan pupuk sintetis yang digunakan dalam pertanian konvensional juga sangat terpengaruh, menantang petani kecil untuk memperkuat metode produksi organik. Saat ini, petani kecil dan Masyarakat Adat di seluruh dunia adalah penjaga keanekaragaman hayati dan berjuang agar hal ini diakui dalam kebijakan global di tengah krisis iklim dan biaya lingkungan akibat perang.

Namun, komunitas petani dan Masyarakat Adat yang sama yang menjadi sasaran perang juga merupakan kekuatan utama perlawanan. Anggota La Via Campesina adalah:

- Mempertahankan tanah dan wilayah dari pendudukan militer, perampasan oleh korporasi, dan pemindahan paksa, seringkali dengan risiko pribadi yang besar.
- Melestarikan benih lokal—arsip hidup warisan pertanian—dari monopoli sistem benih oleh korporasi transnasional.
- Membangun ketahanan agroekologi dengan mengembangkan sistem pertanian yang kurang bergantung pada input impor, lebih sesuai dengan kondisi lokal, dan lebih tahan terhadap guncangan.
- Membangun jaringan pangan lokal dengan memperpendek rantai pasokan, membangun lumbung komunitas, dan memastikan bahwa sistem pangan melayani komunitas daripada pasar ekspor, serta ekonomi solidaritas yang didasarkan pada hak kolektif, seperti koperasi petani dan lembaga komunitas lainnya.
- Saling mendukung melalui aksi solidaritas: Sebagai gerakan petani, organisasi-organisasi kami membangun solidaritas satu sama lain. Kami bergerak di banyak wilayah dan negara untuk menyoroti perjuangan petani yang terdampak perang. Ini merupakan bagian dari pembentukan politik rakyat dan refleksi kolektif kami: untuk memahami dan bertindak menghadapi situasi global saat ini. Bersama gerakan sosial sekutu, kami berupaya mewujudkan hari internasional untuk perdamaian dan melawan imperialisme serta perang.

V. KEDAULATAN PANGAN: ALTERNATIF POLIITK TERHADAP TATA DUNIA

Kedaulatan pangan bukanlah sekadar usulan kebijakan pertanian. Ini adalah sebuah proyek politik, sebuah alternatif menyeluruh terhadap sistem pangan neoliberal yang telah menjadikan kelaparan sebagai ciri struktural kapitalisme global. Didefinisikan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian mereka sendiri, kedaulatan pangan menangani akar permasalahan kelaparan: konsentrasi kepemilikan lahan, monopoli sistem benih, finansialisasi pangan, serta penindasan terhadap komunitas pedesaan demi kepentingan korporasi dan imperialisme.

Kedaulatan pangan sebagai kerangka kerja menawarkan lima dimensi transformatif:

- **Kemandirian pangan nasional dan komunitas:** mengurangi ketergantungan pada jalur impor dan rantai pasokan komoditas global yang dapat dimanfaatkan sebagai senjata melalui sanksi dan blokade.
- **Perlindungan petani, Masyarakat Adat, dan komunitas pedesaan:** melalui reforma agraria, kepastian hak atas tanah, dan pengakuan hukum atas hak-hak petani (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani, 2018) serta hak-hak Masyarakat Adat (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, 2007).
- **Penghapusan kekuasaan korporasi atas rantai pangan:** dengan menantang kontrol monopoli perusahaan benih, pupuk, dan ritel pangan atas sistem pertanian.
- **Keadilan lingkungan dan iklim:** pendekatan agroekologi meregenerasi tanah, memulihkan keanekaragaman hayati, dan membangun ketahanan iklim sekaligus mengurangi jejak karbon.
- **Demiliterisasi kebijakan pangan:** mengakhiri penggunaan sanksi ekonomi, blokade perdagangan, dan penghancuran pertanian sebagai instrumen paksaan politik.

DASAR BUKTI UTAMA: 30 Data Statistik dari PBB dan Laporan

30 Statistik Utama: Kelaparan, Konflik, dan Sistem Pangan		
#	Statistik	Kategori
1	Sebanyak 733 juta orang menderita kelaparan di seluruh dunia (FAO, SOFI 2024)	Kelaparan Global
2	3,1 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat (FAO 2023)	Kelaparan Global
3	Negara-negara yang dilanda konflik menampung 60% dari jumlah orang yang kelaparan di dunia (WFP 2024)	Konflik & Pangan
4	1 dari 5 orang yang terdampak konflik menghadapi kerawanan pangan akut (IPC 2024)	Konflik & Pangan
5	Perang merupakan penyebab utama kelaparan di 80% negara yang berisiko mengalami kelaparan (FAO)	Konflik & Pangan
6	Gaza: 2,2 juta orang – seluruh penduduk – menghadapi kerawanan pangan (IPC 2024)	Gaza
7	Gaza: Lebih dari 80% lahan pertanian rusak atau hancur (Penilaian FAO 2024)	Gaza
8	Gaza: 96% infrastruktur air hancur (Kelompok Kerja WASH 2024)	Gaza
9	Gaza: asupan kalori turun menjadi 245 kkal per orang per hari pada Maret 2024 (IPC/WFP)	Gaza
10	Gaza: Angka malnutrisi akut pada anak mencapai 15,6% di Gaza Utara (NutriHAF 2024)	Gaza

11	Yaman: 17 juta orang mengalami kerawanan pangan, 2,7 juta orang mengalami gizi buruk parah (WFP 2024)	Yaman
12	Yaman: 70% impor pangan masuk melalui Pelabuhan Hodaydah – yang telah diblokade sejak 2015	Yaman
13	Yemen: food prices 180% above pre-war levels (WFP Market Monitor 2023)	Yaman
14	Ukraina: harga gandum global naik 34% dalam satu bulan setelah Februari 2022 (FAO)	Ukraina & Dunia
15	Ukraina dan Rusia memasok 30% dari pasokan gandum dunia dan 60% dari pasokan minyak bunga matahari (IFPRI)	Ukraina & Dunia
16	Ukraina: 4,8 juta hektar lahan pertanian menjadi tidak dapat digunakan (FAO 2023)	Ukraina & Dunia
17	Krisis harga pangan tahun 2022–2023 telah menyebabkan 70 juta orang tambahan terjerumus ke dalam kemiskinan (Bank Dunia)	Ukraina & Dunia
18	Sudan: 17,7 juta orang mengalami kerawanan pangan akut – angka terburuk yang pernah tercatat (IPC 2024)	Sudan / Sahel
19	Sahel: 18,4 juta orang berada dalam kategori kerawanan pangan Tahap 3+ (FEWSNET 2024)	Sudan / Sahel
20	Republik Demokratik Kongo: 23,4 juta orang mengalami kerawanan pangan akut – krisis pangan terbesar di Afrika (IPC 2024)	Sudan / Sahel
21	Pengeluaran militer global mencapai \$2,44 triliun pada tahun 2023 – rekor tertinggi (SIPRI)	Militer
22	AS sendiri menghabiskan \$886 miliar untuk militer pada tahun 2023 – lebih besar daripada 10 negara berikutnya (SIPRI)	Militer
23	Biaya untuk mengakhiri kelaparan dunia diperkirakan sebesar \$267 miliar per tahun (FAO 2022)	Militer
24	Setiap dolar yang dihabiskan untuk pencegahan perang menghemat \$16 dalam rekonstruksi (PBB)	Militer
25	Lima eksportir senjata terbesar memegang kursi tetap di Dewan Keamanan (SIPRI)	Militer
26	80% pangan dunia diproduksi oleh petani kecil (FAO)	Petani
27	60% pengungsi akibat konflik adalah petani sebelum mengungsi (UNHCR)	Petani
28	1,3 miliar orang bergantung pada agroekologi dan pertanian tradisional (IPES-Food 2022)	Petani
29	Konflik telah menghancurkan lebih dari 12 juta hektar lahan subur dalam dekade terakhir (FAO)	Petani
30	Setiap tahun konflik mengurangi hasil pertanian rata-rata sebesar 4,4% (FAO)	Petani

Gambar 4. 30 Statistik Utama tentang Kelaparan, Konflik, dan Sistem Pangan — Sumber: FAO, WFP, IPC, SIPRI, Bank Dunia, UNHCR, FEWSNET (2020–2025)

VI. POSISI POLITIK LA VIA CAMPESINA

La Via Campesina dengan tegas menyatakan pendiriannya terkait situasi global saat ini. Kami adalah gerakan yang didasarkan pada internasionalisme, solidaritas, dan keyakinan politik bahwa perjuangan petani, perempuan, pemuda, dan masyarakat adat di seluruh dunia saling terkait secara mendasar.

KAMI MENGECAM	Semua perang imperialis dan agresi militer terhadap bangsa-bangsa yang berdaulat. Perang di Gaza, Ukraina, Sudan, Yaman, dan tempat-tempat lain merupakan hasil dari sistem yang mengutamakan kepentingan modal dan kekaisaran di atas nyawa manusia.
KAMI MENGUTUK	Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Penghancuran yang disengaja terhadap infrastruktur pertanian, blokade pangan, dan serangan yang menargetkan sistem pangan sipil merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional.
KAMI MELAWAN	Militerisasi ekonomi global. Dana sebesar 2,44 triliun dolar AS yang diinvestasikan untuk senjata pada tahun 2023 sebenarnya bisa digunakan untuk mengentaskan kelaparan di dunia sebanyak sembilan kali lipat. Pilihan ini bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan, melainkan sebuah keputusan politik.
KAMI MENOLAK	Monopoli atas sistem pangan global oleh perusahaan agribisnis transnasional yang kekuasaannya dimanfaatkan secara struktural melalui perang.
KAMI MENEGASKAN	Prinsip-prinsip kedaulatan pangan, reforma agraria menyeluruh, agroekologi petani, feminisme akar rumput, dan hak-hak petani sebagai landasan dari sebuah alternatif yang layak.
KAMI MENDUKUNG	Gerakan global menentang perang dan pelarangan senjata nuklir. Persenjataan nuklir merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia dan planet ini. Keamanan sejati tidak terletak pada pencegahan nuklir, melainkan pada pelucutan senjata secara kolektif dan pengalihan sumber daya global menuju perdamaian, kedaulatan pangan, dan keadilan iklim.

VII. MANIFESTO AKSI

Untuk mengatasi situasi bencana ini, kami menyerukan perlawanan yang terorganisir dan berwawasan internasional. La Via Campesina mengajak negara-negara, gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan rakyat untuk mengambil tindakan konkret di tiga bidang yang saling terkait:

Kepada Negara-negara dan Lembaga Internasional:

- Memperkuat dan memanfaatkan Mahkamah Internasional serta Mahkamah Pidana Internasional untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara agresor atas penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.
- Menerapkan Resolusi PBB No. 377 “Bersatu untuk Perdamaian” guna melewati hak veto Dewan Keamanan dan menyelenggarakan sidang umum darurat mengenai konflik yang sedang berlangsung.
- Memperkuat implementasi Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW, 2017), yang telah disetujui oleh 93 negara.
- Mengalihkan pengeluaran militer ke program kedaulatan pangan, adaptasi iklim, dan ketahanan pertanian di wilayah-wilayah yang terdampak.
- Memperkuat kerja sama Selatan-Selatan untuk membangun kemandirian sistem pangan dari struktur perdagangan imperialis.

Kepada Gerakan Sosial dan Rakyat:

- Gerakkan diri melawan agresi imperialis dan tunjukkan solidaritas kepada seluruh rakyat yang menderita di bawah pendudukan militer atau pengepungan, dari Gaza hingga Sudan, dari Ukraina hingga Yaman.
- Tolak kenaikan anggaran militer di semua negara dan tuntut agar anggaran publik memprioritaskan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan tindakan iklim.
- Bangun dan perkuat jaringan informasi independen, bebas dari kendali media korporat dan imperialis.
- Bangun aliansi antara gerakan petani, serikat pekerja, organisasi feminis, kelompok lingkungan, dan gerakan sosial perkotaan.
- Dukung produksi pangan lokal dan praktik agroekologi sebagai bentuk perlawanan politik.

Kepada Organisasi dan Komunitas Petani:

- Memperkuat sistem benih lokal, lumbung komunitas, dan rantai pasokan pangan lokal sebagai landasan kedaulatan pangan.
- Mendokumentasikan dan menyebarkan informasi mengenai kerusakan sistem pertanian di zona konflik, sehingga hal yang tak terlihat menjadi terlihat.
- Membangun jaringan solidaritas antara komunitas pedesaan di wilayah yang terdampak konflik dan mereka yang berada di daerah yang lebih stabil.
- Pertahankan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani (UNDROP, 2018) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), 2007; keduanya merupakan instrumen perlindungan hukum dan politik.
- Pertahankan reforma agraria yang komprehensif, pembangunan pedesaan, dan bangun kerangka kerja perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip Kedaulatan Pangan.

KESIMPULAN

Perang dan kelaparan bukanlah krisis yang terpisah. Keduanya adalah instrumen kembar dari sistem yang sama, tatanan global yang dibangun di atas komodifikasi kehidupan, militerisasi kekuasaan, dan perampasan struktural terhadap komunitas pedesaan. Buktinya sangat jelas: mulai dari ladang-ladang yang hancur di Gaza hingga lumbung-lumbung yang dijajah di Sudan, dari pelabuhan-pelabuhan yang diblokade di Yaman hingga terminal-terminal gandum yang dibom di Ukraina, sistem pangan sedang dihancurkan sebagai bagian dari tindakan perang.

Namun, bukti juga menunjukkan hal lain: perlawanan adalah mungkin. Petani di Kuba membangun ketahanan agroekologis melawan blokade selama enam dekade. Petani Palestina terus menanam pohon zaitun di bawah pendudukan. Komunitas di Sahel mempertahankan kedaulatan benih di tengah konflik. Ini bukan keajaiban, melainkan hasil dari gerakan kedaulatan pangan yang terorganisir dan internasionalis.

La Via Campesina berdiri, seperti yang selalu dilakukannya, di pihak rakyat. Kami menentang setiap perang, setiap blokade, setiap sanksi yang dirancang untuk membuat rakyat kelaparan hingga tunduk. Kami memperjuangkan hak setiap komunitas di bumi untuk memberi makan dirinya sendiri dengan martabat, di tanahnya sendiri, dengan benihnya sendiri, sesuai dengan tradisi dan pilihannya sendiri.

Agroekologi petani dan solidaritas internasional adalah perjuangan utama kami dalam upaya memulihkan dunia yang sedang dilanda krisis ini. Perjuangan mempertahankan tanah dan pangan adalah perjuangan mempertahankan kehidupan itu sendiri bagi rakyat kami. Perjuangan mempertahankan kehidupan menuntut agar kami menggalang solidaritas secara global dengan cara yang sama efektifnya seperti imperialisme telah mengglobalkan perang-perangnya.

GLOBALIZE THE STRUGGLE, GLOBALIZE HOPE!

La Via Campesina — Gerakan Petani Internasional

April 2026